

**IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR DALAM  
MENGEMBANGKAN MODEL KELEMBAGAAN  
INVESTASI TERPADU DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**Prof. Sutjipto Ngumar, Ph.D., Ak.**  
Guru Besar pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

**Drs. Ikhsan Budi R., M.Si.**  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to dig information about factors that influence decision to invest in an area. The digging information is about service model and conducive investment facilities in the business world.*

*Data processing was conducted by comparing service and license between Licencing Department and Capital Investment that have not conducted One Stop Service, and respondents' response to service and licence in those five regencies/ sities.*

*The result of the research shows that there is a difference pattern and licencing service investment system in the regencies and cities in East Java Province. In fact, from 40 regencies and cities in East Java Province, there are five regions which form Licencing and Capital Investment Department with One Stop Service. The regencies and cities that are examined are Pasuruan Regency, Surabaya City, Gresik Regency, Sidoarjo Regency and Lamongan Regency, and there are only three regencies and cities that have not applied the policy of One Stop Service. They are Surabaya City, Gresik Regency and Lamongan Regency.*

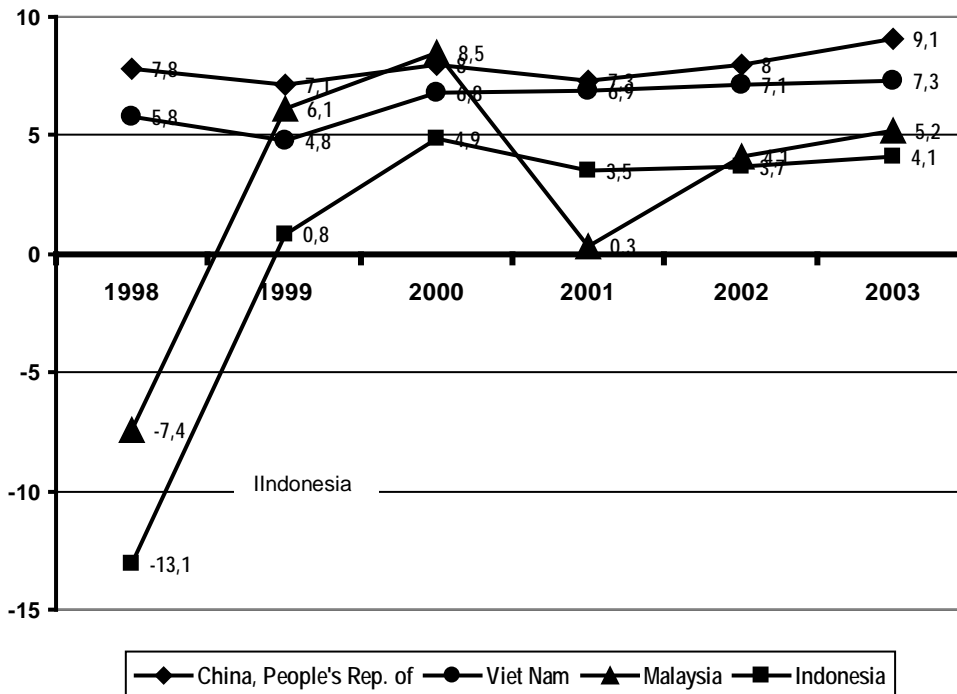
*Besides the efforts of increasing service in investment, investment climate is influenced by several factors, that is economic factors and non economics factor. Economic factors are export value, real income, foreign currency rate of exchange inflation, price level and credit availability. Meanwhile, non economic factors are political factor, law, security and social condition of the society. Therefore, there should be policy's steps in order to optimize investment service in each region.*

**Keywords:** *Factor identification, Department model and United investment.*

## LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan merupakan satu proses yang memakan waktu dan membutuhkan sumber daya. Proses tersebut membutuhkan waktu karena untuk mewujudkan suatu tujuan pasti membutuhkan koordinasi antar berbagai pihak/ instansi. Pembangunan juga membutuhkan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya berupa dana pembangunan.

**Gambar 1**  
**Pertumbuhan Ekonomi (Persen)**



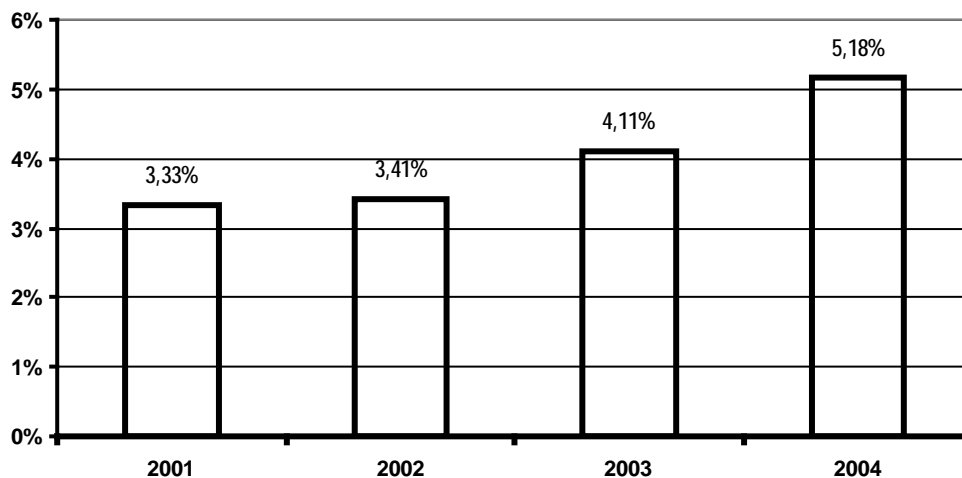
Sumber: Asian Development Bank, *Key Indicator 2004*, pada [http://adb.org/documents/books/key\\_indicators/2004/default.asp](http://adb.org/documents/books/key_indicators/2004/default.asp)

Gambar 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dibandingkan dengan China, Vietnam dan Malaysia ternyata tidak terlalu menggembarakan mengingat pada saat yang sama, yaitu pada tahun 2003, pertumbuhan ekonomi China sebesar 9,1 persen, Vietnam sebesar 7,3 persen, Malaysia sebesar 5,2 persen, sedangkan Indonesia hanya mencapai 4,1 persen. Sementara itu, Dumairy (1997:42) menjelaskan bahwa secara spesifik apabila diukur berdasarkan angka-angka Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi

Indonesia sepanjang periode 25 tahun era pembangunan jangka panjang tahap pertama (PJPT I) tergolong tinggi. Apabila dihitung berdasarkan angka-angka PDB menurut harga konstan, perekonomian Indonesia tumbuh dengan laju rata-rata per tahun 8,56 persen selama pembangunan lima tahun (Pelita) I, Pelita II sebesar 6,96 persen, Pelita III sebesar 6,24 persen, Pelita IV sebesar 5,32 persen dan sekitar 7 persen selama Pelita V. Ini berarti, sepanjang kurun pembangunan jangka panjang tahap pertama ekonomi Indonesia tumbuh dengan laju rata-rata 6,82 persen per tahun. Bertolak dari angka-angka pertumbuhan yang tinggi inilah, World Bank menilai prestasi pembangunan Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di jajaran negara-negara sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini pulalah yang pada tahun 1993 mengantarkan Indonesia (menurut majalah *Time*) menjadi “macan” ekonomi baru di Asia.

Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur, produk domestik regional bruto (PDRB) mulai tahun 2000-2004 tercatat selalu mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, sektor industri pengolahan memiliki peranan dominan dibanding dengan sektor yang lain, berturut-turut sejak tahun 2000--2004 sektor ini memiliki kontribusi 27 persen; 26,5 persen; 25,2 persen; 24,9 persen dan 24,7 persen.

**Gambar 2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur (Persen)**



Sumber: BAPPEPROP Jawa Timur, *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2000--2004*, Surabaya, 2004

Gambar 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama periode tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan hingga pada tahun 2004, yang diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,18 persen.

Investasi disekapati menjadi kata kunci dalam setiap pembicaraan konsep ekonomi di negara ini. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi pada posisi ujung tombak.

Tahun 2003 dan 2004 dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai “Tahun Investasi”, dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan di Indonesia. Sejak tahun 1997, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terus merosot. Tahun 2003, PMDN tinggal senilai Rp.50 triliun dengan 196 proyek. Pada November 2004, tercatat nilai PMDN terus merosot hingga tinggal Rp.33,4 triliun dengan 158 proyek. Pola yang sama juga terjadi pada Penanaman Modal Asing (PMA). Tahun 1997 PMA tercatat sebesar US\$33 miliar dengan 778 proyek. Tahun 2003 anjlok menjadi US\$14 miliar dengan 1.170 proyek. Ironisnya, hingga November 2004 nilai PMA baru mencapai US\$9,6 miliar dengan 1.066 proyek (Kompas, 5 Februari 2005).

Berdasarkan data penanaman modal Provinsi Jawa Timur, dibandingkan dengan tahun 2003, pada bulan Agustus 2004 realisasi PMA di Jawa Timur seharusnya mencapai 45 proyek senilai US\$304,44 juta, sedangkan realisasi PMA pada Agustus 2004 baru mencapai 29 proyek (43 persen dari tahun 2003) dan senilai US\$48,5 juta (11 persen dari tahun 2003).

Hal yang berbeda terjadi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Apabila dibandingkan dengan tahun 2003 pada bulan Agustus 2004 seharusnya realisasi PMDN telah mencapai 13 proyek senilai Rp.1,022 triliun, namun kenyataannya hanya mencapai 7 proyek (35 persen dari tahun 2003) senilai Rp.3,15 triliun (206 persen dari tahun 2003).

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah dan realitas sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan pokok penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh pada keputusan melakukan investasi di suatu wilayah?
2. Model pelayanan dan fasilitas investasi seperti apakah yang kondusif bagi dunia usaha?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan:

1. Menggali informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan melakukan investasi di suatu wilayah.
2. Untuk mengetahui model pelayanan dan fasilitas investasi seperti apakah yang kondusif bagi dunia usaha.

## **KELUARAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keluaran berupa:

1. Informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan melakukan investasi di suatu wilayah.
2. Bentuk model pelayanan dan fasilitas investasi yang kondusif bagi dunia usaha.
3. Tersusunnya rekomendasi pengembangan peningkatan iklim investasi, bentuk model pelayanan perijinan dan fasilitas pendukungnya.

## **SASARAN**

1. Peningkatan iklim investasi dalam suatu wilayah.
2. Peningkatan kualitas model pelayanan dan fasilitas pendukung perijinan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Sumber Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (Marzuki, 1997:55). Dalam penelitian ini data diperoleh dari responden yang menjawab pertanyaan dengan mengirim angket atau mendatangi responden serta melakukan wawancara terstruktur.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (Marzuki, 1997:56). Dalam penelitian ini data diperoleh dari dokumen institusional, buku-buku ilmiah, majalah, tulisan-tulisan atau artikel yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti sebagai landasan dan teori.

## Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara  
Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, antara penanya dan pewawancara untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. *Questionare*  
Yaitu suatu media dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan secara tertulis yang kemudian dibagikan kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
- c. Observasi  
Yaitu suatu metode dimana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan yang ada untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan sasaran.
- d. Studi kepustakaan  
Yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku literatur serta bacaan lain yang mendukung penelitian ini.

Adapun asumsi-asumsi yang diberlakukan terhadap responden untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Responden merupakan subyek yang mengetahui secara langsung maupun tidak langsung proses pelayanan perijinan di daerahnya.
- b. Responden merupakan pelaku yang menjalankan jenis usahanya (perusahaannya).
- c. Responden dianggap cukup mampu baik secara umum maupun pengetahuannya mengenai pelayanan perijinan.

Teknik penyampelan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster sampling*. Adapun distribusi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Distribusi Sampel Penelitian**

No.	Kabupaten/kota	Jumlah sampel
1.	Kota Surabaya	51
2.	Kabupaten Sidoarjo	28
3.	Kabupaten Gresik	30
4.	Kabupaten Lamongan	29
5.	Kabupaten Pasuruan	30
	Jumlah	168

### Sasaran Penelitian/ Lokasi Kajian

Penelitian ini mempunyai sasaran lima kabupaten/ kota di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Lamongan, Gresik, Sidoarjo dan Pasuruan.

### Teknik Analisis

Didalam penelitian ini digunakan dua analisis yaitu analisis yang bersifat deskriptif, yaitu penjabaran hasil penelitian dan analisis yang bersifat eksploratif dari data responden yang lebih mendalam dalam bentuk tabulasi silang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini telah didistribusikan kuesioner pada lima pemerintah kabupaten/ kota meliputi; (1) Kabupaten Sidoarjo, (2) Kabupaten Pasuruan, (3) Kota Surabaya, (4) Kabupaten Gresik dan (5) Kabupaten Lamongan, dengan hasil sebaran sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Karakteristik Responden**

Karakteristik Responden		Kabupaten/ Kota				
		1	2	3	4	5
Jenis Kelamin	a. Laki-laki	60%	68.6%	60%	62,1 %	28.6%
	b. Perempuan	40%	31.4%	40%	37,9 %	71.4%
Posisi responden dalam perusahaan	a. Pemilik	36.7%	41.2%	46.7%	27,6 %	60.7%
	b. Direksi	-	2%	-	-	-
	c. Manajer	-	7.8%	6.7%	-	-
	d. Karyawan	60%	49%	46.7%	72,4 %	35.7%
	e. Lainnya	3,3%	-	-	-	3.6%
Jenis usaha responden	a. Manufaktur	20%	3.9%	10%	-	-
	b. Industri	23,3%	11.8%	6.7%	10,3 %	21.4%
	c. Jasa	23,3%	45.1%	33.3%	31,0 %	14.3%
	d. Perdagangan	33,3%	21.4%	50%	55,2 %	60.7%
	e. Lainnya	-	7.8%	-	3,4 %	3.6%

Skala usaha anda	a. Usaha besar	13,3%	7.8%	6.7%	-	3.6%
	b. Usaha Menengah	36,7%	41.2%	50%	55,2 %	32.1%
	c. Usaha Kecil	50%	51%	43.3%	44,8 %	64.3%
Usia Responden	a. < 17 th	-	0	-	-	-
	b. 17-25 th	26,7%	19.6%	13.3%	20,7 %	14.3%
	c. 26-35 th	33,3%	51%	50%	51,7 %	53.6%
	d. 36-45 th	30%	19.6%	33.3%	20,7 %	28.6%
	e. > 45 th	10%	9.8%	3.3%	6,9 %	3.6%
Pendidikan Terakhir	a. SD	-	0	-	-	-
	b. SMP	-	0	-	3,4 %	3.6%
	c. SMU	63,3%	29.4%	40%	58,6 %	32.1%
	d. Akademi	23,3%	19.6%	30%	6,9 %	10.7%
	e. Sarjana	13,3%	51%	30%	31,0 %	53.6%
Mengurus ijin atas nama	a. Pribadi	43,3%	51%	76.7%	51,7 %	82.1%
	b. Perusahaan	56,7%	49%	20%	48,3 %	17.9%
<b>Karakteristik Responden</b>		<b>Kabupaten/ Kota</b>				
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Pengurusan Ijin	a. Sendiri	46,7%	41.2%	46.7%	51,7 %	50%
	b. Biro jasa	10%	39.2%	16.7%	17,2 %	25%
	c. Orang dalam	36,7%	13.7%	36.6%	31 %	17.9%
	d. Lainnya	6,7%	5.9%	-	-	7.1%
Jumlah ijin yang sudah dimiliki perusahaan	1 ijin	-	2%	-	3,4 %	
	2 ijin	26,7%	23.5%	40%	27,6 %	46.4%
	3 ijin	26,7%	56.9%	33.3%	48,3 %	50%
	4 ijin	16.7%	13.7%	16.7%	13,8 %	
	5 ijin	23,3%	2%	6.7%	6,9 %	
	6 ijin	6,7%	2%	3.3%	-	3.6%

### **Iklm Investasi Pada 5 Kabupaten/ Kota**

Pada penelitian ini, peneliti membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keputusan melakukan investasi dalam suatu wilayah meliputi; pungutan tidak resmi, keamanan, kondisi sosial masyarakat, dan infrastruktur wilayah (fasilitas investasi). Hasil survey adalah sebagai berikut:



### Pungutan Tidak Resmi

Pungutan tidak resmi (pungli) secara sederhana memiliki pengertian sejumlah uang untuk diminta oleh petugas pelayanan publik atas suatu jasa pelayanan publik yang jumlahnya diluar ketentuan berlaku yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jumlah pungutan tidak resmi yang membebani pelaku usaha, secara akumulatif dapat menciptakan suatu tatanan ekonomi dengan total biaya yang lebih tinggi, dikarenakan pungutan tidak resmi tersebut harus diperhitungkan kedalam biaya produksi suatu barang atau jasa. Hal tersebut lebih dikenal sebagai “*High Cost Economy*”. Indonesia merupakan negara yang terkenal sebagai negara dengan “*High Cost Economy*” yang cukup besar.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada lima kota, yaitu; Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Pasuruan, ternyata mayoritas responden menyatakan bahwa lembaga peradilan dan lembaga birokrasi melakukan pungli, dan hampir dari setengah dari responden tersebut menyatakan bahwa pungli oleh kedua lembaga ini secara nominal relatif tinggi atau cukup besar (responden menyatakan bahwa di lembaga peradilan yang melakukan pungli dalam kategori “Tinggi” sebesar 44,6% dan pada lembaga birokrasi yang melakukan pungli dengan kategori “Tinggi” mencapai 44,6%. Informasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3**  
**Pungutan Tidak Resmi**

Kriteria	Lembaga Peradilan	Birokrasi	Keamanan	Organisasi	Preman	Total
Sangat tinggi	6	6	3	7	1	23
Prosentase	3,6%	3,8%	1,8%	4,2%	0,6%	3%
Tinggi	75	75	45	50	21	266
Prosentase	44,6%	44,6%	26,8%	29,8%	12,5%	32%
Sedikit	74	75	80	69	87	385
Prosentase	44%	44,6%	47,6%	41%	51,8%	45%
Tidak ada	13	12	40	42	59	166
Prosentase	7,8%	7%	23,8%	25%	35,1%	20%

Disisi lain ditemukan suatu paradok dimana justru preman yang selama ini identik dengan dunia kriminal khususnya pemerasan, ternyata merupakan pelaku pungli paling kecil dan hanya kurang dari 13,1% responden yang menyatakan bahwa preman melakukan pungli dengan derajat tinggi dan sangat tinggi, selebihnya mayoritas responden (85,9%) menyatakan bahwa pungutan yang dilakukan preman tidak ada atau sangat kecil/ sedikit. Penelitian ini telah membuktikan bahwa saat ini institusi dan

lembaga resmi negara serta organisasi legal merupakan pelaku terbesar premanisme khususnya bagi dunia usaha.

Dua temuan ini sangat buruk bagi iklim investasi di Indonesia dimana institusi dan lembaga negara yang seharusnya mempermudah dan memperlancar proses investasi terbukti malah memperburuk iklim investasi di kelima kota penelitian di Jawa Timur tersebut.

Selain itu adanya temuan bahwa 80% responden masih mengalami pungli baik dalam jumlah besar maupun kecil merupakan hal yang menyedihkan bagi kondusifitas dunia usaha dan investasi di Jawa Timur.

#### **Kondisi Gangguan Keamanan**

Secara ekonomis, keamanan suatu wilayah usaha tidak dapat dengan mudah dinilai atau ditaksir nilainya dengan satuan mata uang tertentu. Namun dalam kenyataannya faktor keamanan merupakan salah satu faktor penentu bagi pengusaha untuk memutuskan melakukan investasi pada suatu bidang atau tempat. Masih segar dalam ingatan kita ketika terjadi *mass riot* di ibu kota Jakarta pada tahun 1997-1998 yang menyebabkan banyak PMA yang memilih hengkang dari Indonesia.

**Tabel 4**  
**Kondisi Gangguan Keamanan**

	Penjarahan	Pencurian/ Perampokan	Penghadangan/ Penodongan	Bajing Loncat	Perusakan Fasilitas	Total Kondisi Keamanan
Tidak Pernah	59 35%	59 35%	80 47%	89 53%	63 37,5%	350 42%
Rendah	59 35%	53 32%	60 36%	59 35%	65 38,5%	296 35%
Sedang	37 22%	39 23%	23 14%	20 12%	27 16%	146 17%
Tinggi	13 8%	16 10%	5 3%	0 0%	13 8%	47 6%
Sangat Tinggi	0 0%	1 1%	0 0%	0 0%	0 0%	1 0%

Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa berbagai gangguan keamanan masih terjadi di daerah terkait dengan usaha yang mereka jalankan dengan derajat tinggi hingga rendah, dengan penjarahan serta pencurian/ perampokan sebagai modus kejahatan yang menurut responden paling sering terjadi. Oleh karena itu

aparat keamanan harus memberi perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Infomasi berikut ini adalah pandangan umum responden mengenai kondisi gangguan keamanan di lima daerah penelitian.

### **Kondisi Sosial Masyarakat**

Secara umum keterbukaan nilai-nilai budaya masyarakat yang berpengaruh terhadap kondusifitas dunia usaha dan investasi sudah cukup baik dimana 75% responden menyatakan bahwa secara kultural masyarakat cukup terbuka. Meskipun demikian masih ada beberapa indikator keterbukaan yang dirasa masih kurang kondusif dan perlu mendapat perhatian yaitu semangat bersaing secara sehat dan semangat berusaha dan bekerja keras. Infomasi berikut ini adalah pandangan umum responden terhadap kondisi sosial masyarakat serta kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di lima daerah penelitian.

**Tabel 5**  
**Kondisi Sosial Masyarakat**

<b>Item-Item</b>	<b>Sangat Terbuka</b>	<b>Terbuka</b>	<b>Kurang Terbuka</b>	<b>Tertutup</b>
Keterbukaan masyarakat terhadap kegiatan usaha	15 8,9%	113 67,3%	38 22,6%	2 1,2%
Keterbukaan masyarakat terhadap pendatang	21 12,5%	117 69,6%	30 17,9%	0 0
Keterbukaan masyarakat terhadap ide-ide	21 12,5%	114 67,9%	30 17,9%	3 1,8%
semangat bersaing secara sehat	17 10,1%	76 45,2%	69 41,1%	6 3,6%
<b>Item-Item</b>	<b>Sangat Terbuka</b>	<b>Terbuka</b>	<b>Kurang Terbuka</b>	<b>Tertutup</b>
Nilai budaya masyarakat atas perlakuan SARA	23 13,7%	112 66,7%	31 18,5%	2 1,2%
Perlakuan atas gender	27 16,1%	104 61,9%	36 21,4%	1 6%
Perlakuan sama antar pendatang	32 19,0%	103 61,3%	33 19,60%	0 0
Semangat berusaha dan kerja keras	24 14,3%	87 51,8%	52 31%	5 3%
<b>Penilaian persepsi responden terhadap sosial budaya masyarakat</b>	<b>13%</b>	<b>61%</b>	<b>24%</b>	<b>1%</b>

**Tabel 6**  
**Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan**

	<b>Sangat kondusif</b>	<b>Kondusif</b>	<b>Kurang kondusif</b>	<b>Tidak kondusif</b>
Kondisi keamanan untuk kegiatan investasi	15 8,9%	113 67,3%	38 22,6%	2 1,2%
	<b>Sangat tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sangat rendah</b>
Daya beli masyarakat memenuhi kebutuhan	9 5,4%	84 50%	58 34,5%	17 10,1%
	<b>Sangat memadai</b>	<b>Memadai</b>	<b>Kurang memadai</b>	<b>Tidak memadai</b>
Ketersediaan lembaga keuangan untuk kegiatan usaha	19 11,3%	81 48,2%	61 36,3%	7 4,2%
	<b>Sangat tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Agak kurang</b>	<b>Kurang</b>
Penilaian pada kualitas tenaga kerja di daerah	10 6%	65 38,7%	44 26,2%	49 29,2%
	<b>Sangat tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Agak kurang</b>	<b>Kurang</b>
Penilaian pada produktifitas tenaga kerja di daerah	8 4,8%	65 38,7%	43 25,6%	52 31%

Secara umum bila dilihat dari tingkat kondusifitas ataupun kualitas beberapa variabel yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini, maka masih perlu kerja keras dari semua pihak agar Jawa Timur bisa menjadi daerah yang lebih menarik sebagai tempat berinvestasi, terutama terkait dengan faktor ketenagakerjaan, ketersediaan lembaga keuangan serta rendahnya daya beli masyarakat di daerah.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus menjadi perhatian serius jika ingin menjadikan Jawa Timur lebih kondusif dan menarik sebagai tempat berinvestasi. Hal ini karena hampir lebih dari 50% responden menyatakan bahwa kualitas tenaga kerja di daerah belum tinggi.

Selain kualitas tenaga kerja yang masih kurang, para responden juga menilai bahwa produktifitas tenaga kerja belum maksimal. Hal ini terlihat lebih dari 50% responden menyatakan bahwa produktifitas tenaga kerja di daerah belum tinggi.

Menarik pula untuk diteliti lebih lanjut mengenai efektifitas dan kinerja lembaga-lembaga keuangan di Jawa Timur, mengingat sekitar 40% responden menyatakan bahwa lembaga keuangan yang ada di daerah mereka masih kurang memadai atau tidak memadai.

### **Infrastruktur Wilayah (Fasilitas Investasi)**

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kondisi infrastruktur wilayah yang terkait dengan realisasi fungsi publik. Infrastruktur tersebut meliputi sarana transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara. Demikian juga dengan fungsi utilitas wilayah yang meliputi fasilitas listrik, air, telekomunikasi dan kawasan industri terpadu. Berikut ini dijelaskan kesimpulan dari hasil survey terhadap fasilitas investasi di daerah penelitian:

- a. Di antara ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang menjadi objek penelitian, responden menilai bahwa kondisi dan ketersediaan jalan darat adalah yang terburuk. Hal ini perlu mendapat perhatian serius karena bagi pengusaha yang lokasi usahanya jauh dari Surabaya dan mereka harus menggunakan angkutan udara atau laut akan berakibat pada tambahan biaya transport.
- b. Untuk ketersediaan dan kualitas fasilitas dasar yang berkaitan dengan industri, dalam hal ini adalah air, listrik dan sambungan telepon, maka perhatian serius perlu ditujukan kepada kondisi ketersediaan dan kualitas air bersih, dimana faktor ini paling banyak mendapat penilaian yang buruk atau kurang baik dari responden. Untuk sambungan listrik dan telepon, meskipun relatif cukup bagus kondisinya, tetapi terlihat perlu peningkatan karena masih ada sekitar 20-25% responden yang belum puas terhadap kondisi kedua faktor dasar ini terkait dengan dunia usaha.
- c. Terkait dengan kawasan industri, kondisi dan ketersediaan pengolahan limbah adalah hal yang paling mendapat perhatian dari responden, dimana lebih dari 50% responden menilai kondisi dan ketersediaan pengolah limbah masih belum memadai dan kurang baik/ buruk.

Pengkajian terhadap fasilitas investasi ini dilakukan dengan cara *crosstabulation*, jenis-jenis fasilitas yang dibagi meliputi; fasilitas jalan darat, transportasi laut dengan sarana pelabuhan, transportasi udara, fasilitas angkutan darat dengan jasa angkutan darat yang kondusif, begitu pula terhadap fasilitas listrik, tersedianya air bersih, sambungan telepon, serta fasilitas kawasan industri yang terpadu.

### **Model Pelayanan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam dua kategori bentuk model pelayanan perijinan yang telah di jalankan/ dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/ kota, yaitu; model pelayanan cukup pada satu dinas (*one stop service*), yaitu

Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan; dan pelayanan yang tidak pada satu dinas (tidak satu atap), yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Hasil tabulasi terhadap hasil survey adalah sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Penilaian Responden Terhadap Proses Perijinan**

<b>Respon terhadap proses perijinan</b>	<b>Sidoarjo</b>	<b>Pasuruan</b>	<b>Surabaya</b>	<b>Gresik</b>	<b>Lamongan</b>
Penilaian waktu proses	Cukup	Baik	Cukup	Baik	Baik
Prosentase	71,4%	76,7%	49%	66,7%	55,2%
Penilaian informasi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Prosentase	57,1%	76,7%	49%	63,3%	65,5%
Penilaian transparansi tarif	Cukup	Baik	Jelek	Baik	Cukup
Prosentase	67,9%	60%	35,3%	60%	48,3%
Penilaian keramahan petugas	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik
Prosentase	50%	63,3%	35%	53,3%	55,2%
Penilaian kecakapan petugas	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
Prosentase	46,4%	53,3%	51%	46,7%	51,7%
Penilaian respon masalah	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
Prosentase	46,4%	56,7%	41,2%	60%	69%
Penilaian fasilitas	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
Prosentase	42,9	63,3%	52,9%	66,7%	58,6%

Keterangan: 1. Pelayanan satu atap; Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan  
2. Pelayanan tidak satu atap; Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten lamongan

**Tabel 8**  
**Harapan Model Kelembagaan**

Model kelembagaan		Sidoarjo	Pasuruan	Surabaya	Gresik	Lamongan
Model satu atap	Ya	100%	98%	96,7%	100%	100%
	Tidak	0%	2%	3%	0%	0%
Harapan dari model satu atap	Proses cepat	10,7%	19,6%	6,7%	6,9%	10%
	Prosedur sederhana	17,9%	21,6%	50%	10,3%	53,3%
	Transparan prosedur	25%	21,6%	30%	31%	16,7%
	Transparan biaya	46,4%	37,3%	13%	51,7%	20%
Bisakah meminimalkan pungli	Ya	53,6%	49%	70%	69%	36%
	Tidak	25%	27,5%	13,3%	27,6%	33,3%
	Ragu-ragu	21,4%	23,5%	16,7%	3,4%	10%
Tanggapan atas statement	Ya	96,4%	0%	66,7%		93,3%
	Tidak	3,6%	0%	33,3%		6,7%

Keterangan: 1. Pelayanan satu atap: Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan  
2. Pelayanan tidak satu atap: Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan

Hasil survey terhadap responden menunjukkan bahwa pelaksanaan model pengurusan satu atap merupakan harapan dari mayoritas responden. Dengan adanya model satu atap ini responden yakin akan mengurangi pungli. Selain itu dengan adanya model satu atap yang dilaksanakan, responden berharap proses lebih cepat, prosedur lebih sederhana, prosedur lebih transparan prosedurnya dan transparan dalam biaya. Tanggapan responden bahwa tidak masalah biaya perijinan asal ada kepastian hukum, selesai dengan cepat dan dilaksanakan dengan transparan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

#### Iklm Investasi Daerah

##### Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat di lingkungan usaha, secara umum bila dilihat dari tingkat kondusifitas ataupun kualitas beberapa variabel yang digunakan masih perlu kerja keras dari semua pihak, agar Jawa Timur bisa menjadi daerah yang lebih menarik sebagai tempat berinvestasi. Hal tersebut terutama terkait dengan faktor ketenagakerjaan, ketersediaan lembaga keuangan serta rendahnya daya beli masyarakat di daerah.

Peningkatan SDM harus menjadi perhatian serius jika ingin menjadikan Jawa Timur lebih kondusif dan menarik sebagai tempat berinvestasi. Hal ini karena hampir lebih dari 50% responden menyatakan bahwa kualitas dan produktifitas tenaga kerja di daerah belum tinggi.

##### Biaya-biaya Diluar Ketentuan

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada lima kabupaten/ kota, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Pasuruan, ternyata mayoritas responden menyatakan bahwa lembaga peradilan dan lembaga birokrasi melakukan penarikan pungutan tidak resmi, dan hampir dari setengah atau 44,6% dari responden menyatakan bahwa pungutan diluar ketentuan oleh kedua lembaga ini secara nominal relatif tinggi atau cukup besar.

Disisi lain, ditemukan suatu paradok dimana justru preman yang selama ini identik dengan dunia kriminal khususnya pemerasan, ternyata merupakan pelaku pungutan tidak resmi paling kecil, yaitu sebesar 12,5%. Penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini institusi dan lembaga resmi negara serta organisasi legal merupakan pelaku terbesar penarikan biaya-biaya diluar ketentuan, khususnya bagi dunia usaha.

##### Keamanan

Pandangan secara umum responden terhadap masalah keamanan di lima kabupaten/ kota, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden (58%) menyatakan bahwa berbagai gangguan keamanan masih terjadi di daerah terkait dengan usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu aparat keamanan harus memberi perhatian khusus terhadap permasalahan ini.



### **Infrastruktur Wilayah**

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kondisi infrastruktur wilayah yang terkait dengan realisasi fungsi publik pemerintah. Infrastruktur tersebut meliputi sarana transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara. Demikian juga dengan fungsi utilitas wilayah yang meliputi fasilitas listrik, air, telekomunikasi dan kawasan industri terpadu. Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana maupun kualitas dari infrastruktur diatas perlu ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga akan berimplikasi terhadap kelancaran pelayanan investasi yang akan masuk ke daerah, khususnya di Wilayah Jawa Timur.

### **Pelayanan Perijinan**

#### **Model Dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Satu Atap**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang membentuk institusi pelayanan satu atap adalah Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan. Model satu atap yang telah dilakukan oleh kedua daerah tersebut mendapat respon yang positif dari para penggunanya. Hal ini didasarkan dari tanggapan responden, yang dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan satu atap yang telah dilakukan cukup memberikan kepuasan, khususnya mengenai pemberian informasi yang diperlukan dan proses pelayanan yang dilakukan petugas.

Tingkat transparansi terhadap tarif perijinan ijin investasi, mayoritas responden menyatakan bahwa transparansi baik. Namun demikian meskipun tidak terdapat responden yang menyatakan bahwa tranparansi tarif jelek, tetapi terdapat masalah terhadap sosialisasi tarif resmi.

Hasil survey terhadap responden menunjukkan bahwa pelaksanaan model pengurusan satu atap di Kabupaten Sidoarjo merupakan harapan dari mayoritas responden. Bahwa dengan adanya model satu atap ini 36% responden yakin akan mengurangi pungli, 33,3% tidak dan 10% ragu-ragu. Selain itu dengan adanya model satu atap yang dilaksanakan, 10% responden berharap proses lebih cepat, 53,3% prosedur lebih sederhana, 16,7% prosedur lebih transparan, dan 20% transparan dalam biaya. Tanggapan responden bahwa tidak masalah biaya perijinan asal ada kepastian hukum, selesai dengan cepat dan dilaksanakan dengan transparan menunjukkan 93% setuju dan 6,7% tidak

Hasil survey terhadap responden menunjukkan bahwa pelaksanaan model pengurusan satu atap di Kabupaten Pasuruan merupakan harapan dari mayoritas responden, bahwa dengan adanya model satu atap ini 53,6% responden yakin akan mengurangi pungli, 25% tidak dan 21% ragu-ragu. Selain itu dengan adanya model satu atap yang dilaksanakan, 10,7% responden berharap proses lebih cepat, 17,9% prosedur lebih sederhana, 25% prosedur lebih transparan, dan 46,4% transparan dalam biaya. Tanggapan responden

bahwa tidak masalah biaya perijinan asal ada kepastian hukum, selesai dengan cepat dan dilaksanakan dengan transparan menunjukkan 96,4% setuju dan 3,6% tidak setuju.

### **Model Dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Bukan Satu Atap**

Pemerintah kota/ kabupaten yang membentuk institusi pelayanan bukan satu atap adalah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Lamongan. Hasil tanggapan responden dari tiga kabupaten/ kota tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut; penilaian responden terhadap pelayanan merupakan salah satu indikator yang harus diketahui dan dievaluasi dari waktu ke waktu. Hal ini cukup penting mengingat dari kepuasan konsumenlah tingkat pelayanan suatu institusi diketahui. Suatu institusi dapat menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pelayanan prima bilamana kepuasan konsumen telah dapat diwujudkan dengan baik.

Ada beberapa usulan yang ditanyakan kepada responden, dan hasil yang diperoleh adalah hampir 100% responden menginginkan perubahan pola kelembagaan, yaitu dari banyak atap berubah menjadi satu atap. Dari tiga kabupaten/ kota, respon menuju perubahan ke *one stop service* menguat setelah dibuktikan dengan perubahan yang diharapkan pada implikasi pelayanan tersebut, yaitu sebagian besar responden menyatakan bahwa model satu atap akan lebih memastikan transparansi tarif/ biaya yang dibebankan pada masyarakat dalam melakukan proses perijinannya. Harapan lainnya yaitu responden beranggapan dengan model satu atap akan lebih menyederhanakan prosedur pelayanan serta proses pelayanan yang dilakukan lebih cepat. Harapan ini tidaklah berlebihan karena memang dalam praktiknya pelayanan melalui banyak meja menimbulkan biaya tinggi dan prosedur yang berbelit-belit. Selain model yang terintegrasi dalam satu atap, mutu dari pelayanannya juga harus ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi dan kejelasan tarif.

### **Fasilitas Investasi**

Kebutuhan fasilitas investasi berupa infrastruktur jalan masih perlu ditingkatkan, sebab 55% responden menyatakan bahwa kualitas jalan masih kurang baik dan 50% responden merasa fasilitas jalan bagi keperluan dunia usaha masih kurang. Transportasi laut sudah cukup baik sebab hanya 35% responden masih merasa kurang memadai dan 40% responden menyatakan kondisi pelabuhan masih kurang baik. Sebanyak 70% responden menyatakan kondisi transportasi udara sudah memadai, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dunia usaha terhadap transportasi udara cukup tinggi. Kebutuhan jasa pengiriman terhadap dunia usaha sangat penting dalam suatu wilayah, berdasarkan hasil penelitian, ternyata 58,35% responden menyatakan memadai dan jasa angkutan barang mayoritas responden menyatakan baik.

Kualitas ketersediaan listrik dan sarana telekomunikasi merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting bagi investor. Fasilitas listrik yang tersedia dinilai responden memadai (58,9%) dengan yang menyatakan kondisi baik sebanyak 52,4%. Untuk sarana telekomunikasi 77% responden menyatakan memadai dan 45% baik. Hal yang perlu

mendapat perhatian serius adalah masalah ketersediaan air bersih, sebab setengah responden menyatakan ketersediaan air bersih kurang memadai atau tidak memadai, dan kualitasnya masih kurang baik.

Kualitas dan ketersediaan kawasan industri, menurut responden masih perlu perbaikan dan penyempurnaan, sebab meskipun lebih dari setengah responden menyatakan bahwa ketersediaan kualitas kawasan industri sudah memadai dan baik, tetapi terdapat 30-40% responden merasa kualitas dan ketersediaan kawasan industri perlu ditingkatkan. Kawasan industri merupakan kawasan yang sangat penting, sebab investasi dalam pengertian investasi secara langsung atau *foreign direct investment* membutuhkan lokasi untuk melakukan investasi yang permanen dalam jangka waktu yang cukup lama.

Kebutuhan atas sarana dan prasarana pengolahan dan pembuangan limbah perlu mendapat perhatian serius, sebab 50% responden menyatakan kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pembuangan limbah kurang/tidak memadai. Pengolahan dan ketersediaan lokasi pembuangan limbah merupakan salah satu fasilitas investasi yang sangat penting.

## **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lapangan dan aspirasi dari responden yang dikumpulkan dalam survey tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Peningkatan kondisi yang kondusif dalam suatu wilayah dan kepastian hukum, merupakan hal yang penting dalam usaha untuk peningkatan suatu iklim usaha yang sehat dan dinamis. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang terkait dengan faktor-faktor peningkatan investasi dalam wilayah diharapkan kontribusinya meliputi penghentian tindakan pungutan liar, peningkatan keamanan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur sebagai daya tarik investasi dalam suatu wilayah.
- b. Peningkatan fungsi dari lembaga investasi Propinsi Jawa Timur sebagai pusat informasi potensi investasi dan teknis pengajuan perijinan bagi setiap pemerintah kota/ kabupaten di Wilayah Jawa Timur, tetapi fungsi ini tidak akan berhasil tanpa kontribusi dari setiap daerah.
- c. Perijinan merupakan pintu gerbang pertama masuknya arus investasi kedalam suatu wilayah, sehingga informasi dan pelayanan yang diberikan kepada calon investor harus jelas dan akurat. Berkaitan dengan hal tersebut, seyogyanya dibentuk suatu *task force* yang bertugas mengkoordinir instansi terkait untuk dapat berkumpul menjadi satu dalam satu tempat, yang dapat dengan mudah dijangkau oleh calon investor.

- Secara teknis, pembentukan *task force* menyesuaikan kondisi masing-masing kota/kabupaten.
- d. Tarif perijinan merupakan satu masalah yang banyak mendapat sorotan dari pengguna layanan perijinan. Seyogyanya besaran tarif dan prosedur pembayaran dapat dipublikasikan secara jelas kepada masyarakat. Beberapa teknis yang dapat dilakukan adalah dengan memasang pengumuman pada tempat strategis, menyediakan tenaga *customer service* yang siap melayani pengguna jasa dan menyediakan *hotline service* bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui fasilitas telepon.
  - e. Peningkatan fasilitas transportasi darat berupa perbaikan kualitas jalan dan ketersediaan jalan perlu diperhatikan. Demikian juga dengan pengembangan dan pembukaan kawasan industri baru dengan fasilitas yang cukup memadai. Dalam bidang penanganan limbah perlu dikembangkan suatu peraturan yang mampu mengakomodasi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penanganan limbah, agar permasalahan dan dampak dari limbah bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Asian Development Bank, *Key Indicator 2004*. [http://adb.org/documents/books/key\\_indicators/2004/default.asp](http://adb.org/documents/books/key_indicators/2004/default.asp).
- Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur. 2004. *Data Perkembangan Proyek PMA dan PMDN di Jawa Timur*. Surabaya.
- Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur dan Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya. 2004. *Aktualisasi Pengembangan Bisnis dan Investasi di Jawa Timur*. Surabaya.
- BAPPEPROP Jawa Timur. 2004. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2000 – 2004*. Surabaya.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta.

- Jhingan, M.L. 1992. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah & Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang)*. Erlangga. Jakarta.
- Lerner, Abba P. 1951. *Economics of Employment*. Mc Graw-Hill. New York.
- Lincolinn, Ivonna & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills.
- Mangkusubroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik* Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya.
- Regional Economic Development Institute (REDI). 2003. *Survei Persepsi Perilaku Usaha Tentang Otonomi Daerah dan Dampaknya Terhadap Iklim Usaha di Daerah (Studi 23 Kabupaten/ Kota di Indonesia)*.
- Rosyidi, Suherman. 1996. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. LP FEUI. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Economic Development* Seventh Edition. Addison Wesley Longman. London.